

**Oleh: Stanislaus Sandarupa**

Sebelum kampanye, Rocky Gerung mengingatkan agar masa kampanye dijadikan ajang latihan kebudayaan (Kompas, 30/5/2009).

Saat ini, performans aspek budaya yang dominan adalah berbicara. Performans politik sebagai mode of speaking merupakan ciri pembeda politik dari kegiatan-kegiatan lain, yang dapat diamati dalam debat, dialog, dan monolog politik terutama dalam debat capres/cawapres.

Tulisan ini membuat penafsiran tentang bagaimana performans politisi kita dalam tanggung jawab kompetensi budaya mereka di depan publik. Kriteria tafsiran didasarkan nilai budaya aksis kasar/halus lewat pemungisian aneka kekuatan bahasa yang para politisi pakai untuk kepentingan politiknya. **Kekuatan acu**

Dari sudut politik budaya bahasa (antropolinguistik), pemakaian kekuatan acu (referensial) bahasa merupakan ciri khas semua aktivitas politik saat ini. Kekuatan acu menunjuk realitas politik luar bahasa. Politisi menyatakan ide tentang masalah tertentu melalui proposisi-proposisi yang dapat diuji benar salahnya.

Para politisi kita banyak memakai kekuatan ini. Ia amat efektif dalam konteks tepat seperti penyampaian visi, misi, dan program capres, janji-janji politik, isu jilbab, ekonomi neolib, etika lembaga-lembaga survei, kemiskinan dan pengangguran.

Latihan kebudayaannya adalah pemakaian rasio, transparansi, penyesuaian kata dengan perbuatan atau antara janji dan pemenuhan janji. Dalam situasi tertentu, ia kedengaran kasar (bahasa gamblang) dan tidak sesuai budaya timur. Namun, alam demokrasi menuntut masyarakatnya untuk berbicara secara jujur dan terus terang.

Sayang dalam debat capres/cawapres, kekuatan ini tidak dipakai untuk mempertajam perbedaan (perlawanan) pendapat sehingga yang terjadi adalah debat santun atau monolog bersama. Namun, para politisi kita memakai kekuatan ini untuk menjelek-jelekkkan lawan politik.

## **Kekuatan puitik**

Lawan referensi adalah kekuatan puitik. Meski kekuatan puitik adalah alat kontrol yang ampuh, ia jarang dipakai. Puitik memproyeksikan prinsip kesepadanan dari aksis seleksi ke aksis kombinasi (Jakobson, 1960) yang muncul dalam similaritas/disimilaritas, sinonim/nonsinonim, dan lain-lain.

Kekuatan puitik banyak dipraktikkan budaya lokal dalam setting formal seperti pemakaian varietas dan tingkat tutur, paralelisme, bentuk figuratif dan maksim, serta disclaimer. Berikut beberapa contoh dan bagaimana kandidat memakainya meski masih amat minim.

Pertama, tingkat tutur yang ada pada masyarakat Jawa, Sunda, dan lain-lain. Geertz menuliskan etiket tingkat-tingkat tutur masyarakat Jawa. Katanya, masyarakat cenderung memakai kromo inggil dalam setting sosial formal. Varietas ini dipakai segelintir masyarakat,

tetapi ia menjadi model ideal tuturan yang benar untuk seluruh masyarakat (Geertz, 1976). Saling memuji di antara politisi merupakan aplikasi pemakaian varietas ini dalam bahasa Indonesia.

Kedua, paralelisme yaitu mengatakan satu hal sebanyak dua kali. Fox telah mendokumentasikan pemakaian bentuk- bentuk ini dalam sejumlah komunitas di Indonesia timur dan pemakaiannya dalam konteks politik dan ritual (Fox, 1988). Paralelisme mencirikan pidato-pidato Bung Karno dan bahasa politik dan ritual budaya-budaya lokal kita dan sudah dipakai Megawati dalam iklan politiknya (Sebarkan, sebarkan...). Dalam debat capres putaran kedua (25 Juni 2006), SBY dan JK membuat tindakan paralelisme dalam bagian penutupan debat dengan mengapropriasi slogan lawan politik. SBY mau juga "Cepat" dan "Tepat", dijawab JK ia juga bersedia "Lanjutkan" kalau dipilih.

Ketiga, pemakaian bentuk figuratif dan maksim. Orator politik lokal juga banyak mengutip wise words nenek moyang untuk mendukung apa yang sedang dibicarakan. Dalam masyarakat Gayo di Sumatera, orator banyak mengutip maksim-maksim kebenaran dari masa lampau (Bowen, 1991). Dalam debat capres-cawapres ada bagian di mana sebaiknya mereka mengutip cita-cita founding fathers seperti pluralisme dan kesejahteraan.

Keempat, disklaimer yaitu pengingkaran kompetensi riil (saya bukan orang yang pantas mewakili Anda) untuk merendah. Dipakai untuk menarik perhatian pendengar dalam menunjukkan kompetensi budaya orator. Ia merupakan standar etiket dan dekorum di mana penyombongan diri tidak bernilai. Dalam iklan, debat, dan pidato politik, SBY memakai ini meski setengah hati. Misalnya, di NTT dikatakan, saya manusia biasa yang punya emosi... (bukan penuh kekurangan) dan lain-lain.

Keempat aspek bahasa puitik di atas disingkat Bloch sebagai formalisasi bahasa. Katanya para orator politik di masyarakat Merina Madagaskar memakai formalisasi sebagai alat-alat tutur untuk mengontrol lawan politik karena dengan pemakaian itu penolakan susah dilakukan (Bloch 1975; Bloch 1985).

Kekuatan puitik kedengaran amat santun tetapi merupakan alat kontrol politik yang amat memukau dan jarang dipakai politisi kita.

## **Berbasis budaya lokal**

Kedua kekuatan bahasa itu dipakai untuk mengontrol lawan politik, tetapi sementara kekuatan acu dapat menimbulkan tantangan, kesantunan kekuatan puitik menghasilkan persetujuan. Pemakaian kedua kekuatan itu tergantung konteks yang terkait tingkat formalitas. Semakin formal performans politik, semakin dominan pemakaian kekuatan puitik atau kesantunan.

Yang terjadi dalam debat capres-cawapres adalah sebaliknya. Meski formal, kesantunan terjadi bukan karena pemakaian aspek puitik, tetapi karena kekuatan acu tidak dipakai untuk mempertajam perbedaan dan menyerang pendapat lawan politik.

Kita menunggu munculnya bentuk paralelisme dan bahasa figuratif Bung Karno dari Megawati

untuk memukau pemilih, varietas kromo dan disklaimer dari SBY guna menarik pilihan rakyat, dan kata-kata bijak Amanagappa dan Lagaligo dari JK untuk meyakinkan pemilih tentang spirit perjuangan.

Ke depan presiden dan wakil presiden adalah politisi, negarawan, sekaligus seniman.

---

*Penulis: Anggota Asosiasi Tradisi Lisan; Dosen Antropolinguistik pada Fakultas Ilmu-Ilmu Budaya, Unhas*

*Sumber: Harian Kompas, Selasa 07 Juli 2009*